



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**

AMN
ADMINISTRASI MUDAH LAYAN

**#KOLABORASI
BANGUN
NEGERI**

LAPORAN HASIL EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PEKANBARU
TAHUN 2026**



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Gedung Lontiok. Lt. 3
Pekanbaru Riau, 28292 Laman : Inspektorat.pekanbaru.go.id

Pekanbaru, 20 April 2026

Nomor : B.700/INSP-IRBAN II/7/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP DLHK Tahun 2026

Yth. Kepala DLHK Kota Pekanbaru
di
Pekanbaru

Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2026 pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- b. Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 280 tahun 2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2026;
- c. Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat nomor : B.700/INSP-UMUM/55/2026 tanggal 06 April Tahun 2026 perihal melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah tahun 2026

2. Tujuan

- a. Informasi pelaksanaan AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah;
- b. Informasi implementasi AKIP;
- c. Nilai implementasi AKIP;
- d. Nilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- e. Saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- f. Monitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

3. Ruang Lingkup

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta Upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan Implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja dan
- e. Penilaian capaian kinerja atau output ataupun outcome serta kinerja lainnya.

4. Metodologi

Evaluasi AKIP menggunakan metodologi kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan, kemanfaatan, tujuan evaluasi, waktu penugasan, serta kendala yang ada, dan memadukannya

dengan metodologi kualitatif berdasarkan professional judgement evaluator.

5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi LHE AKIP Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru belum menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

II. HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru** menunjukkan bahwa nilai sebesar **63,50** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada sepertiga unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu sedikit adanya perbaikan pada unit kerja dan komitmen dalam manajemen kinerjanya. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level pimpinan tertinggi. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30,00	18,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	11,75
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	63,50
Tingkat akuntabilitas Kinerja (Predikat)		B	

Sumber : Kertas Kerja Evaluasi AKIP 2026

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada **Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru** tahun 2026 sebagai berikut :

1. Evaluasi Terhadap Komponen Perencanaan Kinerja

Dari evaluasi diketahui bahwa perencanaan kinerja memiliki kelemahan antara lain:

- a. Penyajian renstra belum sesuai dengan InMendagri No 2 Tahun 2025
- b. Belum menyajikan tujuan , sasaran, indikator sasaran serta target indikator sasaran pada BAB III Renstra
- c. Belum ada data yang menggambarkan target indikator sasaran yang seharusnya berada pada BAB III

2. Evaluasi Terhadap Komponen Pengukuran Kinerja

Dari evaluasi diketahui bahwa pengukuran kinerja memiliki kelemahan antara lain:

- a. Renstra belum menyajikan definisi operasional (DO) beserta formulasi penghitungannya.
- b. Belum membuat standar operasional prosedur (SOP) untuk pengukuran/pemantauan data kinerja.
- c. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;

3. Evaluasi Terhadap Komponen Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses penyampaian informasi yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan oleh organisasi, baik yang berhasil dicapai maupun yang belum tercapai, disertai dengan analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan. Dinas Lingkungan Hidup Dan

Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru telah menyusun laporan kinerja yang dapat dibuktikan dengan dokumen LKJ/LKJIP tahun 2025. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja yaitu ;

- a. Belum terdapat laporan kinerja berkala;
- b. Sistematika LKJIP tahun 2025 masih belum sepenuhnya sesuai Permenpan 53 tahun 2014;

4. Evaluasi Terhadap Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari evaluasi diketahui bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja memiliki kelemahan antara lain:

- a. Masih terdapat rekomendasi evaluasi AKIP tahun 2025 yang belum ditindaklanjuti.
- b. Belum menyampaikan bukti dukung pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP perangkat daerah Tahun 2025

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa nilai sebesar **63,50** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada sepertiga unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu sedikit adanya perbaikan pada unit kerja dan komitmen dalam manajemen kinerjanya. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level pimpinan tertinggi.

2. Rekomendasi

a. Komponen Perencanaan Kinerja

Agar melakukan perbaikan dokumen Renstra dengan cara menyesuaikan sistematika dan substansi penyusunan sesuai ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, serta melengkapi BAB III dengan penyajian tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaan yang terukur dan berbasis data (baseline dan/atau data historis) secara tahunan, serta memastikan konsistensi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.

b. Komponen Pengukuran Kinerja

- Menyusun definisi operasional dan formulasi/ cara menghitung/ mengukur kinerja di dokumen perencanaan (Renstra)
- Menyusun mekanisme/Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran data kinerja;
- Menjadikan Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan yang ditetapkan melalui keputusan pimpinan organisasi.

c. Komponen Pelaporan Kinerja

- Menyusun laporan kinerja secara berkala
- Menyusun Sistematika LKjIP sesuai Permenpan 53 tahun 2014

d. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Agar menindaklanjuti rekomendasi evaluasi AKIP tahun 2025
- Menyampaikan bukti dukung pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP perangkat daerah Tahun 2025

Demikianlah disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam

implementasi SAKIP dilingkungan **Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru**. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami menghargai agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

PEKANBARU, 20 April 2026
INSPEKTUR DAERAH
KOTA PEKANBARU



Dr. Tr. H. ZULHELMI ARIFIN, S. STP., M.Si
NIP. 19810719 199912 1 001